

PENDAMPINGAN PENGAWAS DI TAMAN KANAK-KANAK KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA

Zuliyahajh^{1*}, Wiwik Wijayanti¹

Magsiter Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta¹

Email: zuliyahajh.2024@student.uny.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan yang dilakukan oleh pengawas Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan pengawas telah dilaksanakan mengikuti kerangka Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan laporan. Namun, temuan mengungkap adanya ketidakmerataan dalam intensitas kunjungan, di mana hanya beberapa sampel sekolah binaan yang mendapatkan pendampingan rutin, sementara beberapa sekolah lainnya tidak pernah dikunjungi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi beban kerja pengawas yang terlalu tinggi akibat jumlah sekolah binaan yang banyak, hambatan geografis yang menyulitkan kunjungan langsung, resistensi dari guru senior terhadap perubahan, serta rendahnya penguasaan teknologi informasi di kalangan pendidik. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya redistribusi beban kerja pengawas, pemanfaatan teknologi digital untuk pendampingan jarak jauh, peningkatan kapasitas guru dalam bidang teknologi, serta pendekatan yang lebih persuasif dan kontekstual dalam menghadapi resistensi perubahan. Rekomendasi kebijakan mencakup penyesuaian rasio pengawas terhadap sekolah binaan dan penguatan sistem pendampingan berbasis teknologi untuk menjangkau seluruh sekolah secara merata.

Kata Kunci : Supervisi Pendidikan, Pendampingan Pengawas, Taman Kanak-kanak, Kualitas Pembelajaran

Abstract

This study aims to describe the mentoring process conducted by kindergarten supervisors in Depok District, Sleman Regency, D.I. Yogyakarta, and identify the challenges encountered during its implementation. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the mentoring process generally follows the framework of the Director General of Teachers and Education Personnel Regulation Number 4831/B/HK.03.01/2023 on the Role of School Supervisors in Implementing the Merdeka Belajar Policy in Educational Units, encompassing planning, implementation, and reporting stages. However, disparities were found in the frequency of school visits, with only a few sample schools receiving regular mentoring, while others were never visited. Key challenges include high supervisor workload due to an excessive number of schools under their supervision, geographical barriers hindering direct visits, resistance from senior teachers to change, and low information technology proficiency among educators. The implications underscore the need for workload redistribution among supervisors, leveraging digital technology for remote mentoring, enhancing teachers' technological capacity, and adopting a more persuasive and contextual approach to address resistance to change. Policy recommendations include adjusting the supervisor-to-school ratio and strengthening technology-based mentoring systems to ensure equitable access for all schools.

Key Words : Educational Supervision, Supervisor Mentoring, Kindergarten, Learning Quality

PENDAHULUAN

Pendidikan berkualitas berfungsi sebagai pilar fundamental dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten serta membentuk warga negara yang responsif terhadap tantangan global. Sebagaimana ditekankan dalam visi nasional Indonesia, pendidikan berkualitas sangat penting untuk menciptakan “generasi emas” yang akan memimpin negara menuju masa depan yang sejahtera [1]. Untuk mewujudkan generasi ini, sistem pendidikan harus membekali peserta didik dengan kompetensi yang kompleks dan kontekstual [2].

Sementara itu, semakin banyak penelitian mendokumentasikan pentingnya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas terhadap hasil perkembangan anak ([3], [4], [5], [6], [7], [8]). Penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif dan pengalaman belajar yang menyenangkan di usia dini dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak [9]. Sehingga, kualitas proses belajar-mengajar di PAUD menjadi perhatian para peneliti pendidikan dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.

Salah satu bentuk dukungan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan adalah supervisi. Supervisi sekolah yang efektif secara luas diakui sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pada gilirannya, meningkatkan hasil belajar siswa [10]. Supervisi pendidikan bertujuan untuk menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang memengaruhi proses pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pendidikan [11]. Supervisi juga berperan sebagai dukungan dan arahan profesional bagi pendidik guna meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dorongan, koordinasi, dan arahan yang berkelanjutan [12].

Supervisi pendidikan dapat dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini pengawas sekolah. Selain sebagai pembina, Pengawas

memiliki tugas sebagai evaluator proses belajar-mengajar [13]. Pengawas bertugas sebagai supervisor yang melakukan pengawasan pendidikan untuk memastikan bahwa proses belajar-mengajar berjalan lancar dan efisien [14].

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia, pengawas sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, Pengawas Sekolah bertugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang ditetapkan. Pengawas berperan sebagai pembimbing, pemantau, penilai, dan pelapor yang memastikan kualitas pembelajaran dan tata kelola sekolah selaras dengan kebijakan pendidikan [15].

Pelaksanaan supervisi melibatkan observasi langsung terhadap proses pembelajaran dan praktik manajerial di sekolah. Pengawas kemudian memberikan umpan balik mengenai aspek yang perlu ditingkatkan [16]. Pengawas dapat menerapkan berbagai teknik supervisi, seperti observasi kelas, percakapan pribadi, pelatihan, dan rapat rutin, yang memungkinkan guru mendapatkan masukan konstruktif dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan profesional mereka [17].

Namun, pelaksanaan supervisi di sekolah-sekolah saat ini masih menghadapi tantangan dan sering kali belum berjalan maksimal. Beberapa penyebabnya antara lain: banyak kepala sekolah dan pengawas dihadapkan pada keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga supervisi sering dilakukan secara sporadis dan kurang menyeluruh [18]; faktor jarak geografis yang jauh antara sekolah-sekolah

menyebabkan banyak pengawas yang tidak dapat mengunjungi sekolah-sekolah secara langsung, sehingga supervisi pendidikan tidak dapat berjalan optimal [19]; supervisi sering kali hanya berfokus pada administrasi dan aspek-aspek formal daripada membantu guru meningkatkan keterampilan mengajar dan memperbaiki praktik pembelajaran sehingga kurang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pengajaran di kelas, terutama jika supervisi dilakukan dengan metode evaluatif yang terkesan menghakimi daripada membimbing dan membangun [20]; kurangnya kompetensi dari supervisor [21]; pengawas sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengembangkan keterampilan supervisi mereka yang mengakibatkan mereka cenderung menggunakan metode lama yang kurang sesuai dengan kebutuhan pengajaran modern [22]; serta banyak program supervisi tidak dievaluasi secara terstruktur, sehingga efektivitasnya tidak diketahui dengan jelas [23].

Berdasarkan observasi penulis di TK X Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, pelaksanaan supervisi oleh pengawas masih belum maksimal yang salah satunya disebabkan oleh jaranganya pengawas berkunjung ke sekolah. Bahkan, pengawas tidak pernah mengunjungi sekolah dalam tiga tahun terakhir. Kepala TK Y Kecamatan Depok juga menyampaikan bahwa pelaksanaan supervisi pengawas di sekolah tersebut masih belum berjalan maksimal. Sehingga proses pelaksanaan supervisi oleh pengawas masih perlu menjadi perhatian.

Berbagai kajian dan pemikiran terkini dalam dunia pendidikan telah memicu sejumlah negara untuk menyesuaikan sekaligus menyusun regulasi pendidikan guna menghadapi dinamika dan tantangan kekinian. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut serta dalam

proses perubahan sistem pendidikan, salah satunya mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawas. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Nomor 4831/B/HK.03.01/2023, peran Pengawas Sekolah mengalami perubahan paradigma yang signifikan dalam konteks Merdeka Belajar. Sebelumnya, pengawas berfungsi sebagai pengendali dengan fokus utama untuk memastikan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekarang peran pengawas berubah menjadi pendamping yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Fokus layanan bergeser dari supervisi menjadi pendampingan kepala satuan pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat. Pergeseran paradigma ini diharapkan dapat membangun kolaborasi yang lebih substansial antara pengawas dan kepala sekolah dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul di satuan pendidikan [24].

Namun, bagaimana proses pendampingan yang dilakukan pengawas berdasarkan paradigma baru ini masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendampingan pengawas TK di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, serta mengetahui apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi pengawas dalam pelaksanaan pendampingan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pelaksanaan pendampingan sebagai paradigma baru supervisi dalam mendukung pengembangan kualitas pendidikan serta mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana proses pendampingan pengawas mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan metodologis kualitatif yang berfokus pada pemberian deskripsi langsung dan kaya akan pengalaman atau peristiwa, tanpa elaborasi teoretis atau abstraksi yang mendalam [25]. Metode ini berakar pada *naturalistic inquiry*, yang mempelajari fenomena dalam keadaan alaminya tanpa memanipulasi variabel [26]. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses pendampingan oleh pengawas, bagaimana persepsi dan pengalaman kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah dalam pelaksanaan pendampingan pengawas, serta apa saja tantangan yang dihadapi pengawas dalam proses pelaksanaan pendampingan.

Responden dalam penelitian ini adalah pengawas Taman Kanak-Kanak, Kepala Taman Kanak-Kanak, serta guru dan tenaga kependidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Tri Pusoro Rini dan TK Masjid Kampus UGM, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih responden yang relevan dan bisa memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumen. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi dari pengawas mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendampingan di TK Kecamatan Depok, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan persepsi kepala TK, guru dan tenaga kependidikan mengenai pelaksanaan pendampingan oleh pengawas.

Data juga diperoleh melalui observasi, di mana peneliti hadir langsung di lapangan untuk melihat bagaimana proses

pendampingan yang dilakukan pengawas. Peneliti juga melakukan studi dokumen terkait pelaksanaan pendampingan di lapangan melalui foto kegiatan, catatan lapangan, serta dokumen pelaksanaan pendampingan mulai dari perencanaan sampai laporan hasil pendampingan. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumen. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [27]. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode serta *member checking*, di mana data yang diperoleh dari wawancara divalidasi dengan data hasil observasi dan studi dokumen. Transkrip wawancara dikonfirmasi ulang kepada semua responden untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Hasil wawancara dari pengawas juga diperbandingkan dengan hasil wawancara dengan guru dan tenaga kependidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, supervisi pengawas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta sudah dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sesuai arahan Perdirjen GTK Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan. Proses pendampingan yang dilakukan pengawas lebih mengedepankan kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen, terdapat 4 tahapan yang dilakukan pengawas dalam menjalankan proses pendampingan, yaitu membuat rencana pendampingan, melakukan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, dan menyusun laporan pendampingan.

1. Perencanaan Pendampingan

Perencanaan pendampingan meliputi penyusunan prioritas pendampingan berdasarkan kebutuhan, strategi, metode, dan target yang ingin dicapai. Berdasarkan wawancara, pengawas menyatakan bahwa penyusunan dokumen rencana pendampingan menjadi landasan bagi pengawas dalam melaksanakan kegiatan pendampingan selama satu tahun. Penyusunan rencana pendampingan dilakukan melalui rapat koordinasi dalam forum KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah). Perencanaan pendampingan terdiri dari 5 tahap: pertama, melakukan analisis kebutuhan melalui pemetaan kompetensi kepala sekolah; kedua, menentukan strategi pendampingan yang tepat bagi masing-masing sekolah; ketiga, menentukan metode pendampingan sesuai dengan strategi pendampingan dan program kerja masing-masing satuan pendidikan; keempat, menyusun dokumen rencana pendampingan; kelima, mengirimkan dokumen rencana pendampingan yang telah disusun kepada Kepala Dinas Pendidikan. Pada tahap analisis kebutuhan, pengawas mengacu pada rapor pendidikan sekolah tahun sebelumnya, instrumen penilaian diri kepala sekolah, serta diskusi dan refleksi bersama kepala satuan pendidikan. Rencana program yang telah disusun dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan, dan dilaksanakan dengan memberdayakan satuan pendidikan untuk secara mandiri melakukan perubahan melalui dukungan komunitas belajar.

Temuan ini dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan Kepala TK Masjid Kampus UGM yang menyatakan telah mengisi instrumen penilaian diri yang menjadi salah satu acuan utama pengawas. Observasi dokumen, seperti format penilaian diri dan draf rencana pendampingan tahunan, juga membuktikan adanya kesesuaian antara instrumen yang digunakan dengan prosedur yang dijelaskan

melalui wawancara. Selain itu, pengamatan peneliti dalam forum rapat koordinasi KKPS menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana pendampingan tidak bersifat *top-down*, melainkan melibatkan diskusi antara pengawas dan perwakilan kepala sekolah.

Proses penyusunan rencana pendampingan yang dilakukan oleh pengawas telah mencerminkan prinsip-prinsip pendampingan sebagaimana tertuang dalam Perdirjen GTK No.4831/B/HK.03.01/2023, di antaranya terencana dan strategis, kolaboratif, bertahap dan mandiri, serta berbasis evaluasi. Perencanaan pendampingan pengawas menerapkan prinsip terencana dan strategis, di mana rencana pendampingan yang disusun memiliki tujuan tertentu yang terukur dalam jangka waktu tertentu serta bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Sesuai dengan hasil penelitian [28], bahwa supervisi harus dilakukan secara terencana dan tidak sporadis agar rencana program supervisi efektif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Penyusunan rencana pendampingan juga menggunakan prinsip kolaboratif, di mana pengawas tidak hanya bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan pengawas lainnya dan kepala sekolah satuan pendidikan untuk memastikan perbaikan kualitas pendidikan yang merata [29]. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan guru dan pengawas lainnya dalam perencanaan supervisi akan menumbuhkan hubungan kerja yang terbuka, harmonis, dan saling percaya antara supervisor dan guru [30].

Pendekatan berbasis evaluasi juga merupakan salah satu elemen penting dalam supervisi. Dengan pendekatan berbasis evaluasi, pengawas menyusun rencana pendampingan berbasis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Pendekatan berbasis evaluasi juga menekankan dialog partisipatif antara pengawas, guru, dan

kepala sekolah yang memungkinkan guru untuk secara kritis menganalisis praktik pembelajaran di sekolah, mengidentifikasi tantangan, dan secara aktif merumuskan solusi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogik guru, tetapi juga membangun motivasi intrinsik dan tanggung jawab profesional [31]. Di samping itu, proses refleksi pengawas bersama kepala sekolah dan guru dapat menjadi alat untuk mendorong komunikasi dan keterbukaan yang sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan diri guru [32].

2. Pelaksanaan Pendampingan

Pengawas melaksanakan pendampingan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam wawancara, pengawas menyatakan bahwa tugas utama pengawas meliputi pembinaan, pemantauan, dan penilaian kinerja. Pembinaan oleh pengawas difokuskan pada dua hal utama, yaitu pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja satuan pendidikan. Pembinaan dilakukan melalui komunitas belajar seperti KKKTK (Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak), IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak), dan KKG (Kelompok Kerja Guru). Pertemuan rutin dalam Komunitas Belajar ini menjadi media refleksi dan diskusi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi kepala sekolah dan guru dalam proses pembelajaran serta pengelolaan sekolah. Program-program pendampingan ini juga dikonfirmasi melalui dokumen rencana pendampingan.

Dalam proses pendampingan, pengawas berusaha menerapkan prinsip kesetaraan hubungan dengan kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan. Hasil wawancara dengan kepala TK Masjid Kampus UGM

dan kepala TK Tri Pusoro Rini menyatakan bahwa komunikasi dengan pengawas berlangsung dalam hubungan yang setara dan tidak hirarkis, sebagaimana pernyataan kepala TK Masjid Kampus UGM berikut, “Ya, kami berkomunikasi secara terbuka dengan beliau.” Hal serupa juga diungkapkan oleh guru dan tenaga kependidikan di TK Masjid Kampus UGM sebagai berikut, “Hubungan dengan pengawas cukup baik, Mbak. Beliau cukup akrab dengan kepala sekolah dan guru.” Hubungan yang akrab dan setara ini penting untuk menghilangkan perspektif negatif yang mungkin memandang supervisi sebagai bentuk kontrol atau pengawasan yang menekan kebebasan guru. Hubungan yang konsultatif dan tidak hirarkis mendorong transparansi dan rasa saling percaya yang lebih tinggi, yang dapat berdampak positif pada kinerja guru [34].

Berdasarkan Perdirjen GTK No. 4831/B/HK.03.01/2023, pendampingan pengawas sekolah bertujuan menciptakan budaya kolaborasi, lingkungan belajar yang inklusif, serta praktik reflektif untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam implementasinya, pendampingan ini seharusnya mencakup kunjungan terjadwal dan tidak terjadwal ke seluruh sekolah binaan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian; pengawas cenderung mengunjungi sekolah-sekolah tertentu saja dan mengabaikan yang lain. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan karena mengesampingkan sekolah yang bisa jadi lebih membutuhkan bantuan. Dalam wawancara, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Tri Pusoro Rini menyatakan, “Tidak pernah dikunjungi. Selama 3 tahun saya menjadi kepala sekolah, pengawas tidak pernah berkunjung...” (KTKP). Di sisi lain, Kepala TK Masjid Kampus UGM mengonfirmasi bahwa pengawas rutin

melakukan kunjungan. Hal ini sebagaimana pernyataan kepala sekolah, “Ya, beliau tetap berkunjung, minimal satu kali semester.” Studi dokumen berupa catatan kunjungan dan jadwal supervisi yang diperoleh dari pengawas membuktikan bahwa hanya terdapat 15 dari 63 sekolah yang tercatat dalam agenda kunjungan. Hasil analisis dokumen foto-foto kegiatan dan notulensi pertemuan komunitas belajar (KKTK, IGTKI, KKG) juga menunjukkan bahwa pendampingan lebih sering berlangsung dalam forum kelompok, sementara kunjungan individual yang langsung ke satuan pendidikan sangat terbatas. Dengan demikian, temuan ini menegaskan adanya praktik selektif dalam pelaksanaan pendampingan sehingga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam supervisi belum terpenuhi secara optimal.

Dari total 63 taman kanak-kanak (TK) binaan di Kecamatan Depok, hanya sekitar 15 sekolah yang menjadi sampel kunjungan supervisi. Pendekatan selektif ini menciptakan ketimpangan dalam alokasi perhatian dan bantuan. Padahal, Pasal 5 Perdirjen GTK No. 4831/B/HK.03.01/2023 menegaskan bahwa pendampingan wajib meliputi identifikasi kebutuhan spesifik dan penentuan prioritas berdasarkan evaluasi setiap satuan pendidikan. Dengan tidak terliputnya sekolah-sekolah di luar sampel tersebut, muncul potensi kesenjangan mutu antarsekolah. Hal ini juga dapat mengakibatkan hasil pendampingan kurang maksimal di satuan pendidikan tertentu. Hasil penelitian menyoroti pentingnya supervisi dalam membantu guru mengelola permasalahan pendidikan sehingga ketidakhadiran pengawas secara rutin dapat mengakibatkan guru kurang mendapatkan arahan yang diperlukan [35], [36].

Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman perlu segera

mengevaluasi dan mendesain ulang pola pendampingan. Beban kerja pengawas yang tidak seimbang harus diatasi, misalnya dengan mengadopsi model pendampingan berjenjang atau kolaboratif. Misalnya, selain pengawas sebagai penanggung jawab utama, sekolah-sekolah binaan dapat dikelompokkan menjadi klaster-klaster kecil yang difasilitasi oleh guru inti atau kepala sekolah mentor yang telah terlatih. Pengawas kemudian dapat berperan sebagai supervisor bagi para mentor ini, sehingga jangkauan pendampingan dapat diperluas tanpa menambah beban pengawas secara drastis. Kunjungan fisik yang minim bisa juga dikompensasi dengan program pendampingan virtual yang terstruktur, misalnya dengan konsultasi online terjadwal, bukan hanya sekadar komunikasi lewat *WhatsApp group*.

Dalam hasil wawancara, pengawas menyatakan bahwa pengawas mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pendampingan, misalnya dalam pemantauan dan penilaian kinerja kepala sekolah. Pengawas menggunakan instrumen evaluasi diri yang diunggah melalui *Google Drive* dan *WhatsApp Group*. Hal ini juga dikonfirmasi oleh kepala TK Masjid Kampus UGM dan kepala TK Tri Pusoro Rini. Wawancara dengan kedua kepala sekolah mengungkap bahwa komunikasi dengan pengawas sering dilakukan melalui *WhatsApp Group* dan pengumpulan dokumen evaluasi diri dilakukan dengan memanfaatkan *Google Drive*. Hasil analisis dokumen dalam *Google Drive* juga memperlihatkan beberapa aspek penilaian diri kepala sekolah dalam instrumen evaluasi diri. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi teknologi dalam supervisi modern yang sejalan dengan tuntutan digitalisasi dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital telah meningkatkan pelaksanaan supervisi

dengan mengatasi berbagai kendala, termasuk keterbatasan waktu dan akses yang sering kali menghambat efektivitas supervisi tradisional [37].

Secara umum, peran pengawas sekolah telah bertransformasi dari sekadar penilai dan evaluator menjadi fasilitator dan mitra sekolah untuk memastikan program pembelajaran di tingkat strategis berjalan sesuai standar. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pengawas sekolah berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing guru, membantu mereka mengatasi berbagai tantangan terkait implementasi kurikulum. Sebagai contoh, dukungan dari pengawas dalam memberikan umpan balik konstruktif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru [38]. Di samping itu, mereka bertanggung jawab untuk membantu sekolah mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum dengan efektif [38]. Dengan pendekatan ini, pengawas bisa membantu merancang program pelatihan yang relevan bagi guru, sehingga meningkatkan penerapan kurikulum secara keseluruhan.

3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pendampingan

Setelah melakukan evaluasi pendampingan, pengawas memberikan tindak lanjut hasil supervisi. Pengawas menyatakan bahwa tindak lanjut dapat berupa pelatihan sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Tindak lanjut ini merupakan langkah positif yang mendorong pengembangan kapasitas kepala sekolah dan guru melalui refleksi serta pemberdayaan komunitas belajar. Selanjutnya, pengawas menyusun laporan pendampingan setiap bulan dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Namun, wawancara dengan kepala dan guru-guru TK Tri Pusoro Rini

menunjukkan bahwa pengawas kurang maksimal dalam memberikan tindak lanjut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala TK Tri Pusoro Rini, “Menurut saya, saya kurang mendapatkan dampak dari supervisi pengawas. Selama ini sering kali pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan kami di sekolah...” (KTKP). Guru-guru TK Tri Pusoro Rini juga menyatakan, “Sejauh ini saya rasa belum terlihat hasilnya. Karena pengawas juga tidak pernah datang ke sekolah.” Berbeda halnya dengan pernyataan Kepala TK Masjid Kampus UGM, “Ya, kami sangat merasakan banyak manfaat dari proses pendampingan pengawas. Dalam kunjungan kami banyak diberikan masukan terkait pengelolaan sekolah.” Salah seorang guru TK Masjid Kampus UGM juga menyatakan, “Ya. Saya rasa pendampingan yang dilakukan pengawas sangat bermanfaat bagi kami. Kami di sekolah beberapa kali mendapatkan masukan dari pengawas, misalnya tentang bagaimana mengelola kelas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah, diperoleh data bahwa tindak lanjut dari pendampingan memang memberikan dampak positif bagi sekolah. Namun, dampak tersebut lebih banyak dirasakan oleh sekolah yang lebih sering dikunjungi. Sementara, sekolah yang jarang atau bahkan tidak pernah dikunjungi oleh pengawas mengaku kurang merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan pendampingan pengawas.

Studi dokumen juga mengungkap bahwa laporan yang dibuat hanya berisi laporan evaluasi pendampingan yang dilakukan terhadap 15 sekolah sampel, bukan keseluruhan sekolah binaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip asimetris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dirjen GTK No. 4831/B/HK.03.01/2023 yang mengharuskan pengawas

memperhatikan perbedaan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Evaluasi yang tidak lengkap dapat menghambat upaya pemberian umpan balik spesifik yang diperlukan untuk perbaikan mutu di setiap satuan pendidikan [39]. Kinerja pengawasan dapat terganggu ketika pengawas bertanggung jawab atas jumlah sekolah yang berlebihan, sehingga menyulitkan pemberian pengawasan dan dukungan yang memadai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan pengawasan, khususnya jumlah sekolah yang terlalu banyak yang dibebankan kepada setiap pengawas dapat sangat menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut [39].

Pengawasan yang efektif tidak hanya memerlukan pengamatan yang menyeluruh, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kebutuhan kontekstual dan spesifik tiap lembaga pendidikan. Kurangnya intensitas kunjungan dapat mengakibatkan ketidaklengkapan dalam evaluasi sehingga penilaian yang dihasilkan tidak akurat atau tidak representatif terhadap kondisi sebenarnya di lapangan, yang berimplikasi pada rekomendasi tindak lanjut yang kurang tepat. Ini mempertegas pentingnya pendekatan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan spesifik sekolah dalam proses pendampingan [40]. Mengingat pentingnya tindak lanjut dalam supervisi, penelitian sebelumnya menyarankan adanya peningkatan intensitas kunjungan dan pembinaan berkelanjutan bagi pengawas untuk meningkatkan kinerja guru secara keseluruhan [41].

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan pengawas TK di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu tantangan utama yang diungkapkan

oleh pengawas yaitu kesulitan pengawas dalam mengubah *mindset* guru-guru senior. Guru-guru senior sering kali sudah terbiasa dengan metode pengajaran tradisional dan mungkin memiliki resistansi terhadap perubahan, terutama jika perubahan tersebut terkait dengan metode pengajaran yang lebih modern atau berbasis teknologi. Perubahan *mindset* ini membutuhkan pendekatan yang lebih persuasif dan sabar dari pengawas, serta proses pembelajaran yang berbasis pada pengalaman nyata dan relevansi terhadap kebutuhan guru tersebut. Dukungan moral dan umpan balik konstruktif yang diberikan oleh supervisor kepada guru dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru secara keseluruhan [42].

Kendala lainnya yang dihadapi pengawas adalah kurangnya penguasaan teknologi informasi (IT) di kalangan guru juga menjadi kendala signifikan. Di era digital saat ini, keterampilan IT sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Ketidakmampuan sebagian besar guru dalam memanfaatkan teknologi dengan baik menghambat penerapan metode pengajaran yang lebih inovatif dan efisien. Hal ini membutuhkan solusi praktis seperti pelatihan berkelanjutan mengenai penggunaan teknologi untuk meningkatkan kemampuan guru di bidang IT. Menurut pendapat [43], masyarakat telah mengalami perubahan terus-menerus karena teknologi. Perubahan tersebut kini telah mencapai lingkungan sekolah, sehingga perlu untuk memberikan pelatihan bagi guru agar mampu menggunakan teknologi untuk sepenuhnya mengembangkan siswa mereka di era digital.

Tantangan lainnya adalah jumlah sekolah binaan yang terlalu banyak. Beban kerja yang tinggi ini menyebabkan pengawas kesulitan untuk memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap

sekolah. Dengan jumlah sekolah yang terlalu banyak, kualitas supervisi bisa terabaikan karena pengawas tidak memiliki waktu untuk melakukan pendampingan secara mendalam. Dengan demikian, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman perlu segera menambah jumlah pengawas TK dan memperhatikan rasio jumlah pengawas dan jumlah sekolah binaan agar pelaksanaan pendampingan bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan mutu sekolah. Menurut hasil penelitian, perbandingan yang tidak ideal antara jumlah pengawas dengan jumlah sekolah dan guru yang dibina mengakibatkan proses supervisi tidak dapat berjalan optimal [44].

Hambatan geografis juga merupakan tantangan lain yang diungkapkan oleh pengawas. Jarak yang cukup jauh antara satu sekolah dengan sekolah lainnya memperburuk koordinasi dan efektivitas supervisi. Aksesibilitas yang rendah mengakibatkan pengawas kesulitan dalam melakukan kunjungan rutin ke semua sekolah yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pendampingan yang diberikan ([45], [46]). Hambatan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya merupakan tantangan yang dihadapi oleh pengawas [47]. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital untuk supervisi jarak jauh diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif [42]. Pengawas dapat memanfaatkan platform pembelajaran online, *video conference*, atau aplikasi pembelajaran jarak jauh untuk tetap berkomunikasi dan memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah yang sulit dijangkau secara fisik. Ini akan memungkinkan pengawas untuk tetap memantau dan memberikan dukungan secara lebih fleksibel, meskipun jarak dan akses menjadi kendala.

Secara keseluruhan, hasil temuan observasi ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi teknologi dalam pelaksanaan

pendampingan pengawas untuk menghadapi tantangan jumlah sekolah binaan yang besar. Untuk memastikan dampak positif dari pendampingan secara berkelanjutan dan menyeluruh, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pendampingan yang menyeluruh serta memperhatikan kebutuhan spesifik masing-masing sekolah binaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa peningkatan kualitas dan relevansi supervisi dengan kebutuhan guru di sekolah masih perlu diperhatikan agar supervisi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi betul-betul memberikan dampak positif bagi sekolah [42].

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh pengawas Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, telah mengadopsi paradigma baru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan. Transformasi peran pengawas dari fungsi evaluatif-kontrolatif menuju fungsi kolaboratif-pendampingan ini tercermin dalam tahapan perencanaan yang berbasis pada analisis kebutuhan dan melibatkan forum musyawarah, pelaksanaan yang mengedepankan hubungan setara dan pemanfaatan teknologi digital, serta penyusunan laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawas telah memiliki kesadaran konseptual yang baik terhadap tuntutan perubahan kebijakan dan berupaya mengimplementasikannya dalam praktik supervisi sehari-hari.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap sejumlah kesenjangan

implementasi yang signifikan, terutama terkait dengan ketidakmerataan intensitas kunjungan dan pendampingan antarsekolah binaan, yang menciptakan kesenjangan mutu dan akses terhadap pengembangan profesional guru dan kepala sekolah. Di samping itu, proses pendampingan yang lebih banyak berlangsung dalam forum kelompok daripada kunjungan individual yang langsung ke satuan pendidikan mengindikasikan bahwa pendekatan personal dan kontekstual yang menjadi ciri supervisi klinis belum sepenuhnya terwujud.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan juga turut memengaruhi efektivitas program. Beban kerja pengawas yang berlebihan akibat rasio jumlah sekolah binaan yang tidak ideal, hambatan geografis yang menyulitkan akses kunjungan langsung, resistensi dari guru-guru senior terhadap perubahan metode pembelajaran, serta rendahnya penguasaan teknologi informasi di kalangan pendidik merupakan faktor-faktor yang secara kolektif menghambat optimalisasi peran pengawas sebagai agen perubahan dan peningkatan mutu. Temuan ini mempertegas bahwa transformasi paradigma saja tidak cukup tanpa didukung oleh perbaikan sistemik, terutama dalam hal redistribusi beban kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya dalam memahami kompleksitas implementasi kebijakan supervisi. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap pola pendampingan dengan mendorong terciptanya sistem pendampingan yang

lebih adil, terstruktur, dan adaptif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing satuan pendidikan. Pendekatan pendampingan yang kolaboratif dan berbasis kebutuhan sebagaimana diamanatkan kebijakan terbukti memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun potensi tersebut hanya akan terwujud secara optimal apabila dilaksanakan secara konsisten, merata, dan disertai dengan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman perlu segera menambah jumlah pengawas TK, menata ulang pola pendampingan yang lebih adil dengan memanfaatkan teknologi digital untuk supervisi jarak jauh, serta mengembangkan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah, guna mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kecamatan Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Shaturaev, "Indonesia: Superior Policies and Management for Better Education (Community Development Through Education)," 2021, *researchgate.net*. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Jakhongir-Shaturaev/publication/357271101_INDONESIA_SUPERIOR_POLICIES_AND_MANAGEMENT_FOR_BETTER_EDUCATION_Community_development_through_Education/links/61c46705abcb1b520adb0438/INDONESIA-SUPERIOR-POLICIES-AND-MANAGEMENT
- [2] F. Fauzan, I. Doni, R. Kurniawan, dan M. Muryali, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Proses Penerimaan Peserta Didik

- Baru (Studi pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara),” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 5, no. 1, pp. 45–51, 2022, doi: 10.31334/transparansi.v5i1.1624.
- [3] C. Barata, “Engaging Young Children: Lessons from Research About Quality in Early Childhood Education and Care. Starting strong,” *OECD Publ.*, 2018.
- [4] E. A. Donoghue, C. On, and E. Childhood, “Quality Early Education and Child Care from Birth to Kindergarten,” *Am. Acad. Pediatr.*, vol. 140, no. 2, 2017, doi: <https://doi.org/10.1542/peds.2017-1488>.
- [5] R. Garg, R. Chhikara, A. Kataria, and G. Agrawal, “Exploring the Drivers and Barriers to the Non-Formal Education in Anganwadi Centers for Sustainable Development Education: a Multiple Stakeholder Study,” *Int. J. Incl. Educ.*, vol. 30, no. 1, pp. 1–25, 2026.
- [6] L. Hikmawati and Winnuly, “The Role of Early Childhood Education in Optimizing Social and Cognitive Development,” *EDU-KATA*, vol. 11, no. 1, pp. 11–19, 2025.
- [7] J. Tobin, “Quality in Early Childhood Education: An Anthropologist’s Perspective,” *Early Educ. Dev.*, vol. 16, no. 4, pp. 421–434, 2005, doi: 10.1207/s15566935eed1604_3.
- [8] H. Ulferts, “Impact of Process Quality in Early Childhood Education and Care on Academic Outcomes: Longitudinal Meta-Analysis,” 2019. doi: 10.1111/cdev.13296.
- [9] P. R. Britto *et al.*, “Nurturing Care: Promoting Early Childhood Development,” *Lancet*, vol. 389, no. 10064, pp. 91–102, 2017, doi: 10.1016/s0140-6736(16)31390-3.
- [10] Guntoro, “Supervisi Pengawas dan Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Stimulus dalam Meningkatkan Kinerja Guru,” *J. Ilm. Iqra’*, vol. 14, no. 1, pp. 64–77, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.30984/jii.v14i1.1100>.
- [11] S. Syofian, M. Waruwu, and H. E. Enawaty, “Implementasi Supervisi Pendidikan di Sekolah Dasar dan Dampaknya terhadap Kinerja Guru,” *J. Pendidik. dan Pembelajaran Indones.*, vol. 4, no. 4, pp. 1777–1787, 2024.
- [12] S. Singerin, “Collaboration-Based Academic Supervision Model with Peer Evaluation Approach to Improve Pedagogical Competence and Quality of School Performance: The Role of Principal’s Motivation as Moderation Variables,” *Int. J. Elem. Educ.*, vol. 5, no. 2, p. 268, 2021, doi: 10.23887/ijee.v5i2.34073.
- [13] O. K. T. Kilag, F. T. Uy, and Y. T. Dela Cerna, “Quality Performance of Teachers : Work Environment, Work Attitude, and Principal Supervision : Qualitative Investigation,” *Science Educ. Sci. J.*, vol. 4, no. 7, pp. 415–429, 2023.
- [14] B. B. Wiyono, S. P. Widayati, A. Imron, A. latif Bustami, and U. Dayati, “Implementation of Group and Individual Supervision Techniques, and it’s Effect on the Work Motivation and Performance of Teachers at School Organization,” *Front. Psychol.*, vol. 13, no. July, pp. 1–8, 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2022.943838.
- [15] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Naskah*

- Dinas di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.* Jakarta: Kementerian PANRB, 2021.
- [16] M. Lubis, "Peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal," *Revital. J. Ilmu Manaj.*, vol. 11, no. 2, pp. 216–220, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Revitalisasi/article/view/3188>
- [17] R. R. Kalalo and T. C. Merentek, "Peranan Supervisi Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia," *Rhaps. J. Stud. Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, pp. 64–74, 2023.
- [18] S. Rahmiyati, "Pemanfaatan Aplikasi Google Form dalam Meningkatkan Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Pengawas Madrasah," *J. Pendidik. Madrasah*, vol. 4, no. 2, pp. 201–209, 2020, doi: 10.14421/jpm.2019.42-08.
- [19] H. W. Barnabas, H. N. Tambingon, J. A. . Rawis, M. Lenny, dan Mangantes, "Supervisi dan Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, no. 5, pp. 1696–1701, 2022.
- [20] M. Muchlis dan H. R. Putra, "Implementasi Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru," *ALIGNMENTJournal Adm. Educ. Manag.*, vol. 5, no. 1, pp. 49–58, 2022.
- [21] D. M. Novari, S. Patimah, dan J. Putra, "Analisis Supervisi Pendidikan di SMK Al-Ma'arif Way Kanan," *Al-I'tibar J. Pendidik. Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 71–76, 2023, doi: 10.30599/jpia.v10i2.2651.
- [22] Maryanti, Y. Dwiyono, dan U. Haryaka, "Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik di Sekolah Menengah Atas Balikpapan," *J. Educ.*, vol. 5, no. 4, p. hlm. 8-9, 2023.
- [23] A. Wahib, "Manajemen Evaluasi Program Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Auladuna J. Prodi Pendidik. Guru Madrasah Ibtidaiyah*, vol. 3, no. 1, pp. 91–104, 2021, doi: 10.36835/au.v3i1.512.
- [24] Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, "Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan," *Kementeri. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknol. Republik Indones.*, 2023, [Online]. Available: <https://guru.kemendikdasmen.go.id/dokumen/eBW0gmDzgA>
- [25] S. Hall and L. Liebenberg, "Qualitative Description as an Introductory Method to Qualitative Research for Master's-Level Students and Research Trainees," *Int. J. Qual. Methods*, vol. 23, pp. 1–5, 2024, doi: 10.1177/16094069241242264.
- [26] C. Bradshaw, S. Atkinson, and O. Doody, "Employing a Qualitative Description Approach in Health Care Research," *Glob. Qual. Nurs. Res.*, vol. 4, pp. 1–8, 2017, doi: 10.1177/2333393617742282.
- [27] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitatif Data Analysis: a Methods Sourcebook*, 3rd ed. United States of America: Sage Publications, 2014.
- [28] M. Tohar, "Supervisi Manajerial dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pendidikan di SMA Negeri 1 Jonggat," *J. Paedagogy*, vol. 9, no. 1, pp. 179–185, 2022.

- [29] Hidayat, *Manajemen Supervisi Pendidikan: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Era Digital*. Bandung: Darbooks Media, 2025.
- [30] A. Wibowo, E. Sri, B. Herawati, dan W. Wijayanti, "Langkah Strategis Perencanaan Supervisi Pendidikan Berbasis Kolaborasi," *J. Akuntabilitas Manaj. Pendidik.*, vol. 13, no. 1, pp. 39–52, 2025, doi: <https://doi.org/10.21831/jamp.v13i1.84737>.
- [31] M. I. Hatifuddin and P. M. Mutohar, "Membangun Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam melalui Supervisi Kolaboratif dan Reflektif," *IRSYADUNA J. Stud. Kemahasiswaan*, vol. 5, no. 3, pp. 528–542, 2025, doi: <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v5i3.2609>.
- [32] T. R. Surtiati dan F. R. Sunarya, "Pemahaman Guru terhadap Manajemen Supervisi Akademik oleh Kepala Madrasah: Studi Kasus di MAS Al-Zaytun Indonesia," *Didakt. J. Kependidikan*, vol. 14, no. 3 Agustus, pp. 4239–4250, 2025.
- [33] H. R. Nasution dan R. Ali, "Peran Pengawas dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 10," *Edukasi Islam. J. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. Februari, pp. 247–262, 2021.
- [34] S. Susilo dan S. Sutoyo, "Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru," *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, vol. 4, no. 2, pp. 188–193, 2019.
- [35] S. Aminah, M. Sidik, Y. Yantoro, dan B. Setiyadi, "Implementasi Supervisi dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran dan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar," *Jiip - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 10, pp. 7597–7601, 2023, doi: [10.54371/jiip.v6i10.2981](https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2981).
- [36] A. Sapwan, D. Meirawan, D. Satori, dan C. Sutarsih, "Supervisi Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru," *J. Manaj. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 6, no. 2, pp. 1723–1730, 2025, doi: [10.38035/jmpis.v6i2.4298](https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2.4298).
- [37] S. Sahudi, "Virtual Coaching dalam Supervisi Manajerial: Inovasi Efisien untuk Peningkatan Mutu Madrasah di Era 4.0," *Manajerial J. Inov. Manaj. Dan Supervisi Pendidik.*, vol. 5, no. 1, pp. 240–247, 2025, doi: [10.51878/manajerial.v5i1.5091](https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.5091).
- [38] D. S. S. Wati, A. R. A. Aziz, dan A. Z. Fitri, "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan tinggi," *J. Educ. Res.*, vol. 4, no. 3, pp. 1021–1030, 2023, doi: [10.37985/jer.v4i3.248](https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.248).
- [39] A. F. C. Mulyana dan S. Sumarsih, "Kinerja Pengawas di Sekolah Dasar Integral Hidayatullah Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara," *Manajer Pendidik. J. Ilm. Manaj. Pendidik. Progr. Pascasarj.*, vol. 18, no. 3, 2024, doi: [10.33369/mapen.v18i3.40905](https://doi.org/10.33369/mapen.v18i3.40905).
- [40] D. Dahnian, "Analisis Peran Supervisi Kepala Sekolah terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Guru (Studi Tindakan Sekolah di MIN 4 Labuhanbatu)," *Mudabbir J. Res. Educ. Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 104–114, 2023, doi: [10.56832/mudabbir.v1i2.81](https://doi.org/10.56832/mudabbir.v1i2.81).
- [41] T. Wahyuni, S. Bahri, dan A. Syahrin, "Revitalisasi Praktik Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Inovasi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen," *J. Pendidik. Dasar Flobamorata*, vol. 6, no. 4, pp. 724–735, 2025, doi: [10.51494/jpdf.v6i4.2689](https://doi.org/10.51494/jpdf.v6i4.2689).
- [42] S. Syofian, M. Waruwu, dan H. E.

- Enawaty, “Implementasi Supervisi Pendidikan di Sekolah Dasar dan Dampaknya terhadap Kinerja Guru,” *J. Pendidik. dan Pembelajaran Indones.*, vol. 4, no. 4, pp. 1777–1787, 2024.
- [43] J. M. Fernández-Batanero, M. Montenegro-Rueda, J. Fernández-Cerero, and I. García-Martínez, “Digital Competences for Teacher Professional Development. Systematic Review,” *Eur. J. Teach. Educ.*, vol. 45, no. 4, pp. 513–531, 2022, doi: 10.1080/02619768.2020.1827389.
- [44] Misban, Sudirman dan Fqahrudin, “Pelaksanaan Pengawasan Akademik oleh Pengawas Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Barat,” *J. Prakt. QAdministrasi Pendidik.*, vol. 7, no. 1, pp. 10–17, 2023, doi: 10.29303/jpap.v7i1.505.
- [45] M. A. V Paglinawan *et al.*, “An evaluation of supervisory approaches to improve elementary education in geographically disadvantaged mountainous zones,” *Cogniz. J. Multidiscip. Stud.*, vol. 5, no. 9, pp. 192–203, 2025, doi: 10.47760/cognizance.2025.v05i09.014.
- [46] W. Nafarin, Y. Sari, L. Wijati, N. Warman, and M. Yahya, “Challenges of Academic Supervision in Indonesia’s Humid Tropical Forest Area,” *Int. J. Adv. Soc. Sci. Educ.*, vol. 3, no. 3, pp. 185–194, 2025, doi: 10.59890/ijasse.v3i3.71.
- [47] F. A. P. Akhmad, “Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SD di Kecamatan Tambun Selatan,” *Parameter*, vol. 7, no. 1, pp. 26–40, 2022, doi: 10.37751/parameter.v7i1.185.